

PENGARUH DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Nabilah ¹⁾, PrijonoTjiptoherijanto ²⁾

nabilahbudiharsono@gmail.com¹⁾

^{1 2)} Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Indonesia 10430

Abstract

This study analyzes the impact of village funds on rural poverty in Indonesia by comparing differences between the Western Indonesia Region (KBI) and the Eastern Indonesia Region (KTI). The research is motivated by the crucial role of village funds as both a development instrument and a means of alleviating poverty, which remains a major challenge in rural areas. The study employs panel data from 33 provinces covering the period 2015–2018, using descriptive analysis and panel data regression to examine the relationships among variables. The results reveal that during the observed period, village funds significantly contributed to reducing rural poverty, as indicated by a negative and significant coefficient. In contrast, variables such as economic growth, education, health, unemployment, and the KBI–KTI dummy were not statistically significant. These findings suggest that although village funds are effective in reducing poverty, future strategies should move beyond a focus on physical infrastructure and prioritize human capital development, strengthening of village institutions, promotion of productive economic activities, and provision of supporting infrastructure to improve distribution and market access.

Keywords: *village funds, rural poverty, panel data regression, human capital, economic empowerment*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh dana desa terhadap kemiskinan perdesaan di Indonesia dengan membandingkan perbedaan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya dana desa sebagai instrumen pembangunan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi persoalan utama di wilayah perdesaan. Data yang digunakan berupa data panel dari 33 provinsi di Indonesia pada periode 2015–2018, dengan metode analisis deskriptif dan regresi data panel untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2015–2018 dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sementara variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan dummy KBI–KTI tidak terbukti berpengaruh secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan meskipun dana desa telah efektif dalam mengurangi kemiskinan, strategi pemanfaatannya ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan ekonomi produktif, serta penyediaan infrastruktur pendukung distribusi dan akses pasar.

Kata kunci: *dana desa, kemiskinan perdesaan, regresi data panel, pemberdayaan ekonomi, pembangunan desa*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan sejak tahun 1945 namun masih menyisakan berbagai permasalahan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, antara lain adalah kemiskinan. Salah satu faktor kemiskinan ialah perbedaan karakteristik suatu wilayah yang meliputi sumber energi alam bawaan dan infrastruktur. Kondisi karakteristik wilayah yang beragam di Indonesia, menyebabkan adanya perbedaan signifikan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi KBI relatif lebih subur, memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan infrastruktur yang baik dibandingkan dengan KTI. Hal ini juga berdampak kepada tingkat kemiskinan yang terjadi pada kedua wilayah tersebut.

Persentase penduduk miskin di perdesaan KBI dan KTI mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir antara tahun 2016 sampai 2018. Penduduk yang kurang mampu di KBI pada tahun 2016 yakni 10,48%, pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di perdesaan wilayah KBI mengalami penurunan menjadi 10,05%. Di tahun 2018 persentase penduduk miskin turun mencapai titik terendah sebesar 9,84%. Sementara itu, di KTI persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 19,91%, dan turun menjadi



Received : 2 September 2025

Revised : 12 September 2025

Accepted : 9 Oktober 2025

19,50% pada tahun 2017 dan di tahun 2018 persentase penduduk miskin mencapai 19,27%. Namun kemiskinan wilayah perdesaan di KTI lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan di KBI. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi di perdesaan KBI lebih baik dibandingkan di perdesaan KTI. Secara rinci pada Tabel 1 memperlihatkan Persentase Penduduk Miskin Desa di KBI, KTI, dan Indonesia pada kurun waktu 2010-2018.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Desa di KBI, KTI, dan Indonesia Tahun 2015-2018 (%)

Persentase Penduduk Miskin	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Kawasan Barat Indonesia	10,47	10,48	10,05	9,84
Kawasan Timur Indonesia	20,33	19,91	19,50	19,27
Indonesia	14,09	13,96	13,47	13,10

Sumber: BPS 2020 (diolah)

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah akan menentukan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Rata-rata lama sekolah merupakan indeks yang menggambarkan lamanya masa belajar masyarakat daerah tersebut dalam hitungan tahun (Yunisti, 2012).

Tingkat pendidikan di wilayah perdesaan periode tahun 2015-2018 baik di KBI maupun KTI meningkat. Terdapat peningkatan tingkat rata-rata masa studi di KBI selama periode tahun 2015-2018 yakni dari 8,63% di tahun 2015 menjadi 8,87% di tahun 2018. Tingkat rata-rata masa studi di wilayah KTI juga meningkat selama tahun 2015-2018 yakni dari 8,31% di tahun 2015 menjadi 8,59% di tahun 2018. Meskipun tingkat pendidikan mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi rata-rata lama sekolah di perdesaan KTI maupun Indonesia masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan program wajib belajar 9 tahun. Pada Tabel 2 disajikan perkembangan rata-rata masa studi di KBI, KTI dan Indonesia.

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun di KBI, KTI, dan Indonesia (tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Kawasan Barat Indonesia	8,63	8,72	8,80	8,87
Kawasan Timur Indonesia	8,31	8,45	8,52	8,59
Indonesia	8,32	8,42	8,50	8,58

Sumber: BPS, 2020

Selain faktor pendidikan, faktor kesehatan juga penting dalam pembangunan manusia yang harus dimiliki masyarakat perdesaan untuk meningkatkan potensinya. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kesempatan masyarakat perdesaan untuk meningkatkan kesehatan sehingga dapat berproduksi dengan produktif. Indikator pembangunan manusia dari segi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH di wilayah perdesaan KBI dan KTI meningkat cukup signifikan pada periode tahun 2015-2018. Pada tahun 2015, AHH di KBI yakni dari 69,06 tahun menjadi 69,45 tahun di tahun 2018. AHH di perdesaan KTI juga meningkat di tahun 2015 yaitu 67,19 tahun menjadi 67,69 tahun di tahun 2018. Pada Tabel 3 disajikan perkembangan AHH di KTI dan KBI pada kurun waktu 2015-2018.



Angka Harapan Hidup	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Kawasan Barat Indonesia	69,06	69,13	69,27	69,45
Kawasan Timur Indonesia	67,19	67,33	67,45	67,69

Sumber: BPS, 2020

Berbagai program pemerintah telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Efek Penanggulangan Kemiskinan (IDT). Program IDT ditujukan untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan dalam upaya penanggulangannya. Program IDT fokus kepada penanggulangan secara komprehensif serta terpusat guna percepatan pembangunan sosial untuk memastikan ketahanan, kemandirian, dan ketangguhan. Selain itu, karena sistem tidak dapat menjamin penggunaan dana bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif, maka dana bantuan lebih berpeluang untuk keperluan konsumsi daripada untuk keperluan produksi, terutama pada masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya program IDT mengalami banyak kendala salah satunya adalah kemacetan dalam penyaluran dana. Setelah tiga tahun program IDT berjalan, banyak pihak menilai bahwa program tersebut gagal dalam menanggulangi kemiskinan.

Pada tahun 2014 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berdampak pada perhatian pemerintah kepada desa. Guna mendorong percepatan pembangunan di Indonesia termasuk di desa, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 mengembangkan program Nawacita.

Dana desa merupakan alokasi dari APBN yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan di tingkat desa yang diperuntukkan untuk adminitrasi publik, pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa nasional disiapkan Pemerintah pada APBN setiap tahun. Dengan bantuan dana desa, diharapkan tingkat kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan di perdesaan akan berkurang.

Pada tahun 2015 hingga tahun 2018, Program dana desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik di KBI maupun di KTI yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di desa. Penduduk miskin di KBI tahun 2018 berjumlah 10.454 jiwa (9,84%) turun 1.775 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2014 yang berjumlah sebesar 12.229 jiwa (10,02%). Jumlah penduduk miskin di KTI tahun 2018 mencapai 5.089 jiwa (13,10%) turun 53 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebesar 5.142 jiwa (13,76%).

Riset terdahulu pengaruh dana desa terhadap pengurangan kemiskinan sangat bervariasi. Menurut Penelitian Adhiem (2019), dana desa mempunyai dampak yang positif dalam menurunkan angka kemiskinan di desa dan juga mengurangi gini ratio.

Berbeda dengan penelitian Hartati, E. S et al (2017), dana desa belum efektif menurunkan kemiskinan karena masih banyak desa tidak mempunyai kemampuan perencanaan dalam menggunakan dana desa, selain itu dalam berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak oknum yang menyalahgunakan dana desa sehingga tidak tersalurkan sepenuhnya kepada masyarakat. Diantara kedua pendapat tersebut, diperlukan adanya reformulasi dana desa agar lebih efektif menurunkan kemiskinan.

Program dana desa pertama dan terbesar di dunia ini sangat menarik untuk dikaji khususnya pengaruh dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak dana desa bukan hanya kepada output (hasil pembangunan infrastruktur) tetapi lebih kepada outcome (kemiskinan). Seperti dijelaskan di atas, kemiskinan dipilih karena angka kemiskinan di perdesaan masih cukup tinggi dan perlu diperhatikan. Studi ini juga berusaha membuktikan klaim pemerintah bahwa dana desa telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama:

1. Apakah pengalokasian dana desa telah berjalan tepat saran dalam menekan kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di wilayah perdesaan KBI dan KTI?
3. Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk menyempurnakan instrumen dana desa agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan perdesaan di masa mendatang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian kebijakan prioritas dalam pengalokasian dana desa serta menelaah pengaruh alokasi tersebut terhadap tingkat kemiskinan di KBI dan KTI.
2. Menyusun strategi penyempurnaan instrumen dana desa guna mendukung upaya penurunan kemiskinan pada periode mendatang

TINJAUAN PUSTAKA**Dana desa**

Sebelum adanya program dana desa, pemerintah fokus pada perdesaan melalui program Inpres Bagi Desa Tertinggal (IDT) pada masa Orde Baru. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, Program IDT adalah program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di perdesaan. Program IDT bertujuan untuk mengkoordinir seluruh instansi dan lembaga pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; membantu masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan kesempatan kerja yang produktif; mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat kurang mampu dengan bantuan dana khusus/BLT; dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri masyarakat.

Program IDT memberikan dana bergulir kepada setiap desa tertinggal sebesar Rp 20 juta sampai dengan Rp 60 juta per tahun selama 3 tahun. Pertama kali program ini dirilis banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan usaha sendiri, sehingga Pemerintah memutuskan untuk menyediakan tenaga pendamping. Tenaga pendamping disesuaikan pada keahlian yang dibutuhkan daerah setempat dengan pelaksanaan 2-3 bulan. Dengan waktu pendampingan yang sangat singkat, masyarakat belum mampu untuk menciptakan inovasi dan mengembangkan program IDT (Sulistiyani, 2004).

Program IDT yang pernah dijalankan pemerintah dinilai kurang efektif sehingga digantikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru. Program IDT dan PNPM yang dilaksanakan sebelumnya di perdesaan dinilai tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan di perdesaan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mencanangkan pembangunan desa secara lebih menyeluruh di berbagai sektor. Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat desa kemudian dilembagakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi kewenangan bagi desa dalam mengelola potensi lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zarkasi, 2018).

Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Besarnya alokasi ditentukan oleh faktor jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan geografis. Dana ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan antar desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperbaiki kualitas layanan publik di tingkat desa.

Kemiskinan

Menurut World Bank (2000), kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan sendiri bersifat multidimensi dan umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut, ketika pendapatan berada di bawah garis kemiskinan sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dan kemiskinan relatif, yaitu ketika kesejahteraan seseorang masih jauh di bawah rata-rata lingkungannya meskipun kebutuhan pokok sudah terpenuhi.



Kedua bentuk kemiskinan tersebut memiliki keterkaitan erat dan perlu dianalisis secara komprehensif, sehingga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena berbagai faktor yang saling berhubungan, di antaranya keterbatasan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, infrastruktur, hingga kondisi geografis (Nazara, 2007). Faktor ini saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena berdampak pada lingkaran kemiskinan ketika tidak terpenuhi. Pada umumnya masyarakat miskin terpusat di perdesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan berdampak pada pendapatan yang rendah.

Menurut penelitian Permana et al (2012) faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan laju pertumbuhan PDRB. Kesejahteraan masyarakat terwujud karena tingginya produktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kesehatan yang baik.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Pada tahap awal pembangunan, jumlah penduduk miskin memang cenderung bertambah, tetapi dalam jangka panjang pembangunan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Kesehatan

Rata-rata orang hidup lebih lama di negara yang memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Sehingga mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi secara ekonomi.

3. Pendidikan

Keterampilan dan pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Produktivitas yang rendah di kalangan masyarakat miskin dikarenakan sulitnya mendapatkan akses pendidikan.

4. Pengangguran

Pengangguran menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan.

Kondisi ini pada akhirnya memperparah tingkat kemiskinan, karena semakin banyak individu tidak memiliki sumber penghasilan yang layak.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui dua pendekatan. Kebijakan langsung, berupa bantuan seperti Beras Miskin dan Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Kebijakan tidak langsung, berupa program pendidikan dan kesehatan seperti Bantuan Operasional Sekolah dan BPJS Kesehatan.

Untuk menyukseskan kebijakan penanggulangan kemiskinan maka dibutuhkan keikutsertaan masyarakat untuk melaksanakan program dan fasilitatornya adalah pemerintah. Perlu juga disusun strategi keberlanjutan program (kegiatan) di masyarakat binaan melalui koordinasi antar instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dana desa, kemiskinan, dan indikator pembangunan manusia di Indonesia, sekaligus merumuskan strategi pengalokasian dana desa yang lebih tepat. Sedangkan analisis regresi data panel digunakan untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh dana desa terhadap kemiskinan antarprovinsi di Indonesia.

Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dari data time series (2015–2018) dan data cross-section (antarprovinsi). Gujarati dan Porter (2013) menjelaskan bahwa dalam regresi data panel terdapat beberapa pendekatan umum yang dapat dipakai, yaitu:

1. Common Effect Model (Pooled Least Square/PLS)
2. Fixed Effect Model (FEM)
3. Least Square Dummy Variable (LSDV)
4. Random Effect Model (REM)



Pemilihan Model Panel

Untuk mendapatkan model terbaik dilakukan dua pengujian utama:

1. Chow Test

Digunakan untuk menentukan apakah model yang sesuai adalah PLS atau FEM

H_0 : Model PLS lebih tepat

H_1 : Model FEM lebih tepat

Jika *Chow Statistics* (F statistik) > FN-1, NT-N-K, maka H_0 ditolak, sehingga model FEM dipilih.

2. Hausman Test

Digunakan untuk memilih antara FEM dan REM

H_0 : Model REM lebih tepat

H_1 : Model FEM lebih tepat

Apabila nilai statistik *Hausman* > *Chi Square*. Maka H_0 ditolak dan FEM dianggap lebih sesuai.

Perumusan Model Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, model penelitian ini mengacu pada Permana et al. (2012) dengan menambahkan variabel dana desa. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \alpha_{1it} + \beta_1 \text{Ln}(\text{DD}_{it}) + \beta_2 \text{LPE}_{it} + \beta_3 \text{Ln}(\text{RLS}_{it}) + \beta_4 \text{Ln}(\text{AHH}_{it}) + \beta_5 \text{TPT}_{it} + \beta_6 D_{6it} + e_{it}$$

dimana:

Kemiskinan = Kemiskinan

α_1 = konstanta/intercept

DD = Dana Desa

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB harga konstan)

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

AHH = Angka Harapan Hidup

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

D_{6it} = Dummy KBI dan KTI (KTI=1; KBI=0)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = koefisien regresi

e_{it} = error term

i = 33 provinsi

t = periode 2015-2018

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengalokasian Dana Desa dan Pemanfaatannya**

Dana desa merupakan transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dibagikan ke seluruh desa dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah administrasi, kondisi geografis, serta jumlah desa di tiap daerah. Dasar hukum ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014.

Pada tahap awal implementasi (tahun 2015), dana desa diarahkan terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Program yang dijalankan mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan melalui posyandu dan dukungan pendidikan anak usia dini.
2. Penyediaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik.
3. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
4. Pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan.

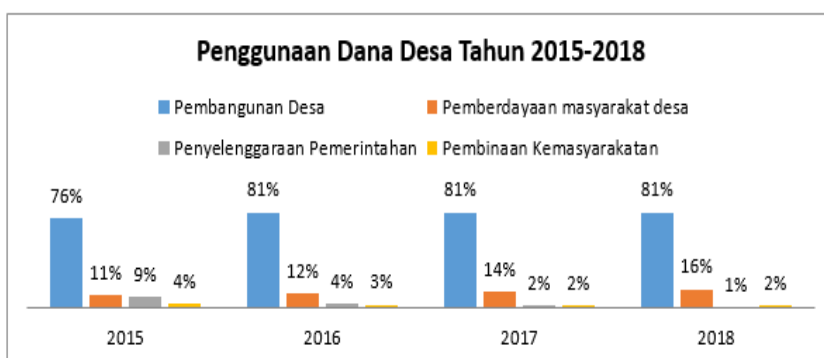
Pada tahun 2016–2017, orientasi pemanfaatan dana desa mulai lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik desa (jalan, jembatan, sekolah, dan sarana kesehatan), disertai program pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Bisnis



masyarakat. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar lebih mandiri, inovatif, dan mampu berkompetisi, sehingga desa dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

Memasuki tahun 2018, fokus penggunaan dana desa mengalami penyesuaian dengan menekankan pada program unggulan desa, seperti pendirian BUMDes, pembangunan embung, dan fasilitas olahraga. Penetapan kegiatan di tahun ini lebih bersifat partisipatif, karena disesuaikan dengan kebutuhan serta musyawarah masyarakat desa.

Jika dilihat dari proporsi penggunaan, mayoritas dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu sekitar 76% pada tahun 2015 dan meningkat hingga 81% pada 2018. Sementara itu, alokasi untuk pemberdayaan masyarakat relatif lebih kecil, meskipun mengalami peningkatan dari 11% pada 2015 menjadi 16% pada 2018. Sebaliknya, porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat cenderung menurun, karena sebagian kebutuhan tersebut sudah ditopang oleh sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa. Rincian penggunaan dana desa tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Kemendes, 2020

Gambar 1. Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2018

Pada gambar 2 disajikan besaran output hasil penggunaan dana desa. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa outputnya sebagian besar baru berupa infrastruktur (sarana) transportasi seperti jalan, jembatan, dan tambatan perahu; sarana pertanian seperti sarana irigasi dan embung; sarana pendidikan seperti PAUD; sarana kesehatan seperti sanitasi dan permukiman; sarana air bersih, sumur, MCK, Polindes, POSYANDU, olah raga (Raga desa), panahan tanah, dan pagar desa; serta sarana ekonomi, seperti pasar desa dan Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES). Dengan dibangunnya berbagai sarana tersebut maka masyarakat perdesaan dapat melakukan aktivitas ekonominya mulai dari produksi di bidang pertanian dan usaha lainnya, mulai dari pengolahan sampai pemasaran dengan terbukanya akses akibat dibangun sarana tersebut. Selain itu dengan dibangunnya sarana permukiman, sanitasi dan kesehatan serta pendidikan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.





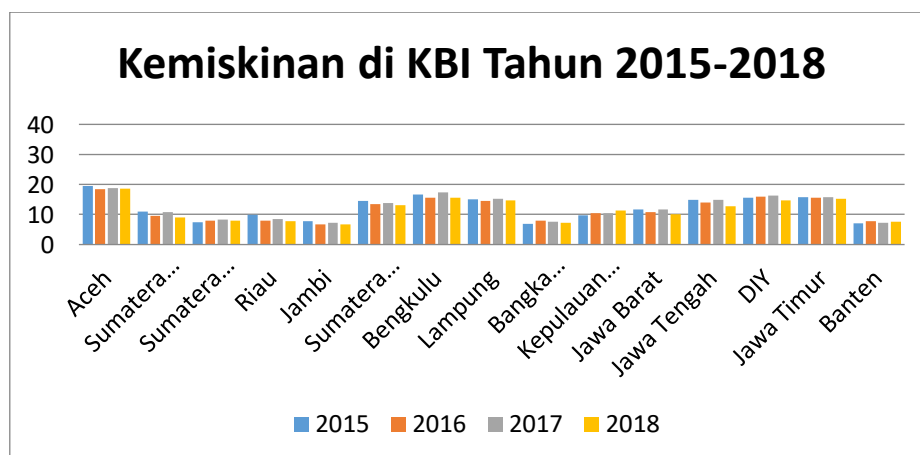
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019)

Gambar 2. Output dari Penggunaan Dana Desa 2015-2018

Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan hambatan pembangunan pada negara berkembang. Kemiskinan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan tetap rendah. Masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya dihadapi di wilayah KBI tetapi juga di wilayah KTI. Perbedaannya pada angka kemiskinan, luas wilayah, dan jumlah penduduk suatu daerah.

Selama periode 2015–2018, sebagian besar provinsi di KBI menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan. Beberapa provinsi yang mengalami penurunan paling nyata adalah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan (lihat Gambar 3). Pada tahun 2015, Aceh mencatat angka kemiskinan tertinggi di KBI sebesar 19,56%, sedangkan yang terendah berada di Bangka Belitung sebesar 6,83%. Pada tahun-tahun berikutnya, pola yang sama terlihat: Aceh tetap memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, sementara provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah berpindah antara Jambi dan Bangka Belitung. Hingga tahun 2018, persentase penduduk miskin di Aceh turun menjadi 18,52%, sedangkan Jambi mencatat angka terendah sebesar 6,80%.

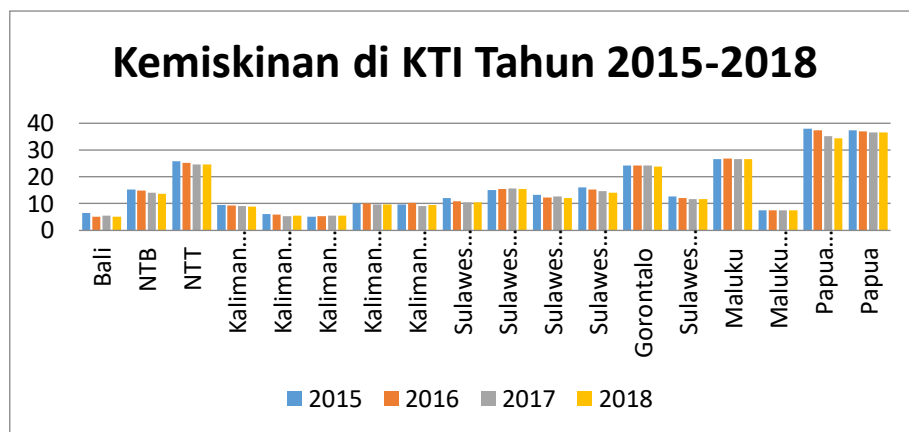


Gambar 3. Kemiskinan Desa di KBI Tahun 2015-2018

Wilayah KTI juga mengalami tren penurunan angka kemiskinan pada periode yang sama. Namun, persentase kemiskinan di KTI masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun KBI. Pada tahun 2015, Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 37,94%, sedangkan Kalimantan Selatan hanya 5,06%. Tahun 2016 persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 37,33% sementara persentase penduduk miskin yang paling rendah di Bali sebesar 5,21%. Tahun 2017 persentase Sosial Ekonomi dan Bisnis



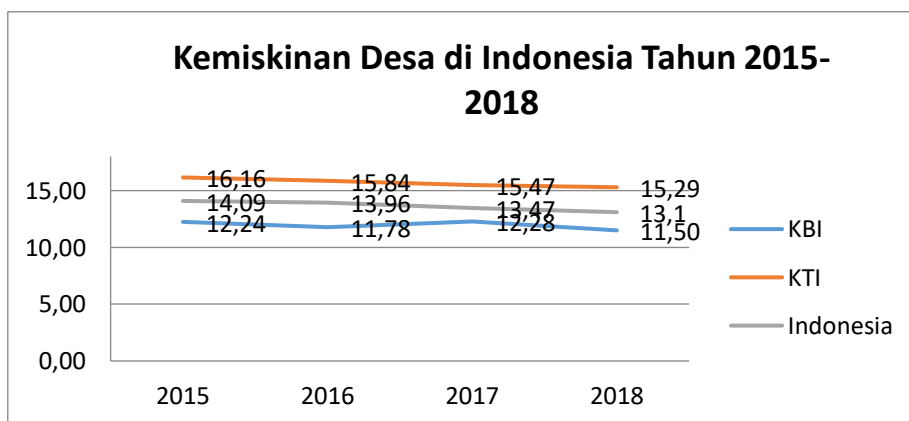
penduduk miskin tertinggi terjadi di Papua sebesar 36,56% sementara persentase penduduk miskin yang paling rendah di provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,41%. Tahun 2018 di mana Papua tetap mencatatkan angka kemiskinan tertinggi sebesar 36,65%, sementara Bali menjadi provinsi dengan angka kemiskinan terendah yaitu 5,08% (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Kemiskinan Desa di KTI Tahun 2015-2018

Secara nasional, kemiskinan menunjukkan penurunan bertahap, dari 14,09% pada 2015 menjadi 13,10% pada 2018. Namun, tren di KBI sedikit berbeda, karena sempat terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2017 meskipun angkanya tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun tersebut, tingkat kemiskinan di KBI tercatat sebesar 12,28%, lebih rendah dari rata-rata Indonesia sebesar 13,47%.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di KTI konsisten lebih tinggi dibandingkan KBI maupun angka nasional. Selama periode 2015–2018, penurunan kemiskinan di KTI tercatat sebesar 0,87%, sedikit lebih baik dibandingkan KBI yang hanya turun 0,74%. Tingginya tingkat kemiskinan di KTI dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai dan rendahnya kualitas pendidikan, sehingga sulit untuk para investor menanamkan modalnya di perdesaan KTI. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu sumber daya manusia di kawasan perdesaan KTI.



Gambar 5. Kemiskinan Desa di Indonesia Tahun 2015-2018

Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk menampilkan ringkasan karakteristik variabel penelitian melalui Sosial Ekonomi dan Bisnis



ukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, nilai terendah, dan tertinggi. Ringkasan ini memberikan gambaran variasi data antarprovinsi di Indonesia selama 2015–2018. Hasil lengkap ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
Kemiskinan	5,8642	1,1909	3,3243	8,4099
Dana Desa	20,6193	0,9749	18,1874	22,6308
Pertumbuhan Ekonomi	5,4941	3,0348	-6,2566	24,5921
Kesehatan	4,2221	0,0409	4,1407	4,3098
Pendidikan	2,0109	0,0945	1,6784	2,2428
Pengangguran	4,7215	1,9456	1,0637	11,19
Dummy	0,5454	0,4998	0	1

Angka tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,86 dengan variasi 1,19. Nilai minimum sebesar 3,32 dan maksimum 8,41 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemiskinan antarwilayah.

Dana desa memiliki rata-rata 20,61 dengan standar deviasi relatif rendah (0,97), yang menandakan distribusi dana desa antarprovinsi relatif seragam meskipun terdapat perbedaan jumlah desa.

Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan variasi yang cukup besar (standar deviasi 3,03) dengan nilai minimum -6,25 dan maksimum 24,59. Hal ini mencerminkan adanya provinsi yang mengalami kontraksi ekonomi, sementara provinsi lain tumbuh sangat tinggi.

Kesehatan memiliki rata-rata 4,22 dengan variasi kecil yaitu 0,04, menandakan kondisi relatif homogen antarprovinsi dalam indikator kesehatan.

Pendidikan memiliki rata-rata 2,01 dengan standar deviasi 0,09. Variasi antarprovinsi tidak terlalu jauh, meskipun terdapat provinsi dengan capaian pendidikan relatif lebih rendah yaitu 1,67 dibandingkan yang tertinggi yaitu 2,24.

Pengangguran memiliki rata-rata 4,72 dengan variasi cukup besar yaitu 1,94. Perbedaan terlihat jelas antara provinsi dengan tingkat pengangguran sangat rendah sebesar 1,06 dan yang cukup tinggi yaitu 11,19.

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Indonesia

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel dana desa (β_1) memiliki koefisien sebesar -0,198. Nilai ini mengindikasikan bahwa, dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan dana desa sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 0,198%. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan semakin besar dana desa, semakin rendah tingkat kemiskinan.

Secara parsial, dana desa signifikan pada taraf kepercayaan 90% dengan nilai probabilitas $0,068 < 0,1$. Artinya, peningkatan alokasi dana desa berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan perdesaan. Temuan ini juga konsisten dengan hasil uji *univariate* maupun uji stabilitas.

Efektivitas dana desa terlihat dari penggunaannya pada pembangunan infrastruktur dasar serta program pemberdayaan masyarakat. Pembangunan jalan desa, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat. Sementara itu, melalui pemberdayaan kelembagaan seperti BUMDes, kelompok tani, dan organisasi sosial lainnya, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi desa serta memperkuat kemandirian ekonomi.

Temuan ini mendukung penelitian Annisa dan Seftaria (2019), Aghnia (2018), Sunu, Suryawan & Putra (2019), dan Arfiansyah (2020) yang menyatakan bahwa dana desa berperan penting dalam menurunkan kemiskinan. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Susilowati, Prasetyo & Lestari (2017), Handayani (2019), Harmiati, Sari & Putra (2019), dan Ghozali (2019) yang menyimpulkan bahwa dana desa belum berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Strategi Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Mendatang

Berdasarkan hasil kajian menunjukan dana desa yang telah dialokasikan untuk membangun banyak sarana transportasi, pertanian, pendidikan kesehatan, sanitasi dan permukiman, serta sarana ekonomi ternyata



program tersebut berpengaruh dalam penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan Indonesia. Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada kemiskinan di perkotaan antara lain adalah:

1. Pengalokasian pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih relatif kecil, yaitu 11%. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan pemanfaatan untuk infrastruktur yang mencapai 76-81% dari total dana desa.
2. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan belum mampu meningkatkan produktivitas masyarakat perdesaan karena pembangunan infrastruktur tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya. Sebagai contoh pembangunan sarana pertanian berupa embung, saluran irigasi dan jalan desa, serta jalan pertanian tidak disertai dengan penyediaan bibit unggul yang berproduktivitas tinggi dan ketersediaan pupuk yang tepat waktu. Selain itu, pendampingan yang ada tidak dalam kapasitas meningkatkan pengetahuan tentang teknik budidaya tanaman pertanian, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran barang pertanian dan hasil olahan pertanian. Padahal kondisi kapasitas masyarakat perdesaan tentang teknik budidaya tanaman pertanian masih rendah.
3. Pembangunan infrastruktur yang telah meningkatkan konektivitas antar desa dan antara perdesaan dengan perkotaan, menyebabkan harga lahan-lahan di perdesaan meningkat. Hal ini mendorong orang-orang kota untuk membeli lahan-lahan pertanian masyarakat perdesaan, yang diakibatkan karena kondisi kemiskinan dan kebutuhan masyarakat perdesaan. Kondisi ini menyebabkan petani tidak lagi memiliki lahan lagi, mereka hanya menjadi buruh tani atau paling tinggi hanya menjadi penggarap.
4. Akses dari dan ke desa yang semakin mudah menyebabkan para pedagang pengumpul dan tengkulak, langsung ke desa dan menekan harga pembelian barang pertanian dari petani. Hal ini antara lain karena kelembagaan masyarakat perdesaan masih kurang kuat bahkan dapat tidak dikatakan belum jalan, contohnya BUMDES yang masih belum berfungsi dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, strategi pemanfaatan dana desa yang dapat dilakukan secara prioritas adalah:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - a. Menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
 - b. Menyelenggarakan program pelatihan bagi generasi muda maupun orang tua di sektor pertanian dan bidang terkait, meliputi keterampilan pengolahan hasil pertanian, peningkatan akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung produktivitas desa.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan keterampilan usaha dibidang ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
- Pembangunan infrastruktur penunjang produktivitas desa, seperti perbaikan jalan menuju kawasan produksi, sarana distribusi, serta fasilitas untuk memperluas akses pemasaran, baik secara langsung di pasar tradisional maupun melalui platform digital.

SIMPULAN

Kesimpulan

1. Pengalokasian dana desa selama 2015–2018 pada dasarnya telah mendukung penurunan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat, meskipun porsi nya masih didominasi oleh pembangunan fisik. Dampaknya terlihat dari peningkatan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta transformasi status desa menuju lebih mandiri, sehingga alokasi dana desa dapat dikatakan tepat sasaran dalam upaya mengurangi kemiskinan.
2. Dana desa terbukti berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan. Semakin besar dana desa yang diterima, semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Pemanfaatan dana desa mendorong masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan lokal serta memanfaatkan potensi desa dalam mengembangkan perekonomian sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Sementara variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, serta



perbedaan KBI–KTI tidak berpengaruh signifikan.

3. Strategi pemanfaatan dana desa yang efektif sebaiknya diprioritaskan pada tiga aspek utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas agar lebih efektif menurunkan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiem, M. A. (2019). Optimalisasi pengelolaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan. *Majalah Ilmiah Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(14/II), 1–15. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Aghnia, N. (2018). *Pengaruh dana desa dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor). Institut Pertanian Bogor.
- Annisa, S., & Seftarita, C. (2019). Pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(4).
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Gini rasio provinsi 2002–2019*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase penduduk miskin menurut provinsi*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Rata-rata lama sekolah menurut provinsi*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Buku Pintar Dana Desa* (Cetakan ke-2) [PDF]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf>
- Ghozali, S. (2019). *Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam perspektif ekonomi Islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Gujarati, D., & Porter, D. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika* (Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, D. (2019). Analisis pengaruh penggunaan dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 8(1).
- Harmiati, H., Sari, A., & Putra, R. (2019). Analisis pemberian dana desa dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 8(1).
- Hartati, E. S et al. (2017). *Proyeksi ekonomi Indonesia 2017: Menguji ketangguhan ekonomi Indonesia*. INDEF.
- Nazara, S. (2007). Pengentasan kemiskinan: Pilihan kebijakan dan program yang realistis. *Warta Demografi*, 37(4), 1–14. Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Permana, A., et al. (2012). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004–2009. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1).
- Republik Indonesia. (1993). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Presiden Republik



- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sunu, M. K., Suryawan, I. N., & Putra, I. G. G. A. (2019). Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(8), 843–872.
- Susilowati, N., Prasetyo, B., & Lestari, D. (2017). Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4).
- World Bank. (2000). *World development report 2000/2001: Attacking poverty*. Washington, DC: World Bank.
- Yunisti, T. D. (2012). *Analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten* [Thesis]. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zarkasi, A. (2018). Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIPOL Universitas Jambi*, 2(1). <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7323>

